

# STRATEGI PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH MELALUI ALOKASI ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOGOR

Erik Harninta Putra<sup>1\*</sup>, A. Faroby Falatehan<sup>2</sup>, Harianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

\*E-mail: [erhapu@gmail.com](mailto:erhapu@gmail.com)

Diterima 16 Oktober 2022, Disetujui 30 Maret 2023

## Abstrak

Pembangunan manusia menekankan pada perluasan kesempatan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Pendidikan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tujuan dari pembangunan manusia. Pencapaian pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kabupaten Bogor mempunyai potensi sumber daya manusia dalam jumlah besar yang didominasi oleh penduduk usia produktif namun pencapaian RLS Kabupaten Bogor masih tetap berada di bawah pencapaian RLS Provinsi Jawa Barat dan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan RLS di Kabupaten Bogor. Metode analisis yang digunakan yaitu SWOT untuk merumuskan alternatif strategi dan QSPM untuk menentukan strategi prioritas. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran bidang pendidikan yang produktif menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor. Kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pembangunan bidang pendidikan yakni peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal berupa program kejar paket A, B, dan C, Proporsi alokasi belanja yang memberikan manfaat langsung senantiasa ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi dan edukasi.

**Kata kunci:** RLS, pembangunan pendidikan, SWOT, QSPM

## Abstract

*Human development emphasizes on enlarging people's choices and improving their well-being. Education is a key to meet the goals of human development. It could be seen through Mean Years Schooling (MYS) as an indicator indicating education achievement of community. Bogor regency has a potential human resource dominated by productive age. However, their Mean Years Schooling is still under the Mean Years Schooling achievement of West Java Province and national level. The purpose of this research was to formulate a strategy in improving Mean Years Schooling in Bogor regency. This study used SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) as analisis methods. There were seven alternative strategies formulated by SWOT analysis that then were prioritized using QSPM in order to obtain a priority strategy. It was finally determined that implementing a productive budget allocation on education development was the priority strategy for increasing Mean Years Schooling in Bogor Regency.*

**Keywords:** MYS, education development, SWOT, QSPM

## PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi namun juga melalui pencapaian pembangunan manusia karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak secara otomatis mampu meningkatkan derajat kesejahteraan manusia (Hasan, 2018). *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* (1990) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. (Siregar et al., 2018) menyebut dalam konsep tersebut manusia diposisikan sebagai tujuan akhir sedangkan proses pembangunan dipandang sebagai sarana mencapai tujuan tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat (Thahir, 2019). Salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* digunakan untuk mengetahui capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan

lama sekolah (HLS) dan rata-rata sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS, 2019).

Pencapaian IPM suatu daerah sangat bergantung kepada tinggi rendahnya nilai indeks pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga indeks tersebut akan mempresentasikan

mana tingkat pembangunan di masing-masing bidang. Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal sedangkan harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak berusia 7 tahun ke atas di masa mendatang. Indeks kesehatan dibentuk oleh indikator angka harapan hidup saat lahir yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan tingkat kesehatan suatu masyarakat. Dalam mencerminkan pencapaian pembangunan di bidang ekonomi, indikator pengeluaran per kapita disesuaikan digunakan sebagai pembentuk indeks ekonomi pada IPM (BPS, 2019). Indeks pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2015-2021 masih berada di bawah indeks kesehatan dan indeks pengeluaran sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** IPM Kabupaten Bogor dan komponen pembentuknya

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	69,13	69,69	70,65	70,40	70,60
Indeks Kesehatan	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79
Indeks Pengeluaran	0,69	0,71	0,72	0,71	0,71
Indeks Pendidikan	0,60	0,60	0,62	0,62	0,62

Sumber: BPS (2022)

Sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan di Kabupaten Bogor, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2020 menunjukkan angka 8,30 tahun atau setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama. Hal ini merupakan gambaran pencapaian pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor yang rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas tidak secara penuh menamatkan pendidikan formal pada jenjang SMP. Padahal sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia mencapai 5.427.068 jiwa dimana lebih dari 70% merupakan penduduk dengan usia produktif serta berbatasan langsung dengan beberapa daerah aglomerasi Jabodetabek, Kabupaten Bogor memiliki potensi tinggi dalam keberhasilan pembangunan daerah melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Todaro et al. (2011) menyatakan bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan dan ekonomi dari bangsa. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat dikembangkan bukan hanya untuk menambah pengetahuan namun juga meningkatkan keterampilan kerja sehingga mampu menambah produktivitas kerja (Munir, 2016). Anggorowati et al., (2019) mengartikan bahwa pendidikan sebagai sektor yang menentukan mutu suatu

bangsa. Kajian Suratini (2017) menunjukkan jika pendidikan dapat dijangkau oleh semua masyarakat maka pertumbuhan ekonomi juga akan tercapai. Herdiansyah (2020) menyatakan pembangunan pendidikan yang maksimal akan signifikan meningkatkan IPM. Investasi modal manusia bidang pendidikan akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan penghasilan tenaga kerja (Yanti et al., 2020). Oleh sebab itu, pembangunan sektor pendidikan menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menempatkan pembangunan pendidikan bermutu harus tercapai sebelum tahun 2030. SDGs menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan bidang pendidikan melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah melalui belanja pemerintah bidang pendidikan. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut perlu dilakukan kajian tentang bagaimana strategi peningkatan rata-rata lama sekolah melalui alokasi anggaran bidang pendidikan di Kabupaten Bogor.

## KAJIAN TEORI

*United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* (1990) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. *United Nations Development Program* (UNDP) sejak 1990 memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indeks komposit untuk mengukur indikator pencapaian pembangunan manusia yang mampu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lain dalam kehidupan. Hasil pengukuran tersebut kemudian setiap tahunnya rutin dipublikasikan dalam *Human Development Report*. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yang diukur melalui tingkat pendidikan sebagai aspek pengetahuan (BPS 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan berdasarkan data IPM metode terbaru yang dikeluarkan oleh BPS adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan Indeks Pembangunan

Manusia, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang akan menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS 2015). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sedangkan cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan Rata-rata Lama Sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Usia 25 tahun dipakai batasan berdasarkan rekomendasi UNDP.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri karena lebih memahami kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang salah satunya berbentuk pelayanan dasar berupa pendidikan. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk mengelola pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP, PAUD, dan pendidikan non-formal.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan. Mangkoesobroto (2016) menyatakan

pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Hasil kajian (Soempena, 2021) menunjukkan belanja pendidikan mempengaruhi peningkatan indeks pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Belanja fungsi pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Fahmi 2018); (Mongan, 2019); (Hadinata dkk., 2020); (Harjunadhi & Rahmawati, 2020); (Iskandar, 2021). Kajian Margaretha & Simanjuntak (2020) menunjukkan belanja fungsi pendidikan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan alokasi belanja bidang pendidikan juga berpengaruh terhadap peningkatan RLS di Provinsi Sulawesi Selatan (Basri et al. 2017).

## METODE

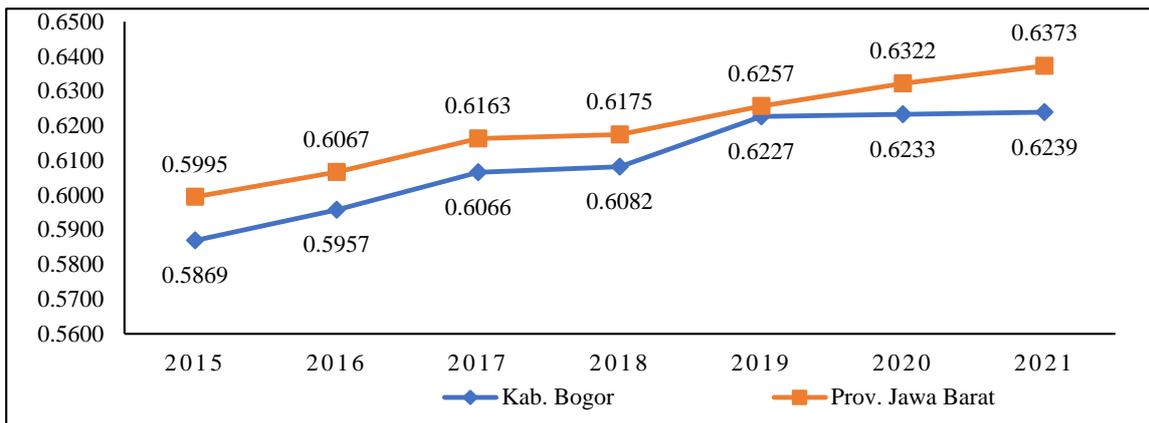
Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terstruktur serta kuesioner terhadap responden *expert* yakni Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia serta Kepala Bidang Pendidikan Bappedalitbang, Kepala Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kepala bagian Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan pemangku kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan laporan kinerja instansi terkait.

Gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor dianalisis berdasarkan data sekunder dalam bentuk tabulasi, diagram, dan grafik. Alternatif strategi peningkatan RLS di Kabupaten dirumuskan berdasarkan hasil analisis faktor internal, eksternal, dan analisis SWOT. Pemilihan strategi prioritas dilakukan dengan menggunakan analisis *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan capaian RLS melalui alokasi anggaran bidang pendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Pendidikan di Kabupaten Bogor

Nilai indeks pendidikan Kabupaten Bogor terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2019, nilai indeks pendidikan Kabupaten Bogor mencapai 0,6227 yang meningkat 0,01 dari tahun sebelumnya. Meskipun terjadi kenaikan, peringkat indeks pendidikan Kabupaten Bogor masih berada di bawah pencapaian nilai indeks pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,6257. Sebagai daerah dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk paling padat, Kabupaten Bogor memiliki nilai indeks pendidikan yang bervariasi pada tingkat kecamatan. Pada tahun 2019, Kecamatan Gunung Putri merupakan daerah dengan perolehan nilai indeks pendidikan tertinggi sebesar 0,6755 sedangkan perolehan nilai terendah berada di Kecamatan Sukamakmur sebesar 0,5473.

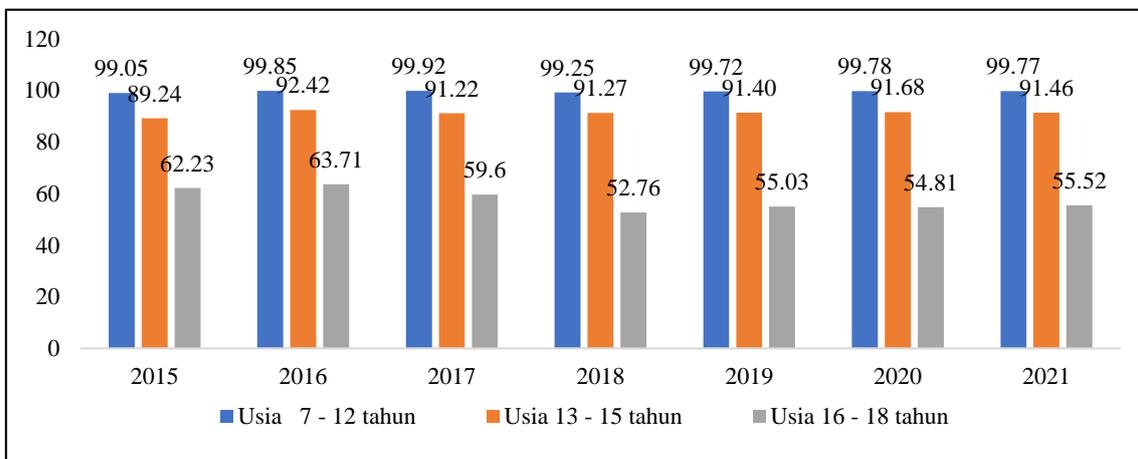


Gambar 1. Indeks pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2015-2021

Sumber: BPS (2021)

Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2015 sampai 2021. APS kelompok usia 7-12 tahun telah mencapai lebih dari 99 persen setiap tahunnya yang berarti kurang dari 1 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah formal sedangkan APS kelompok usia 13-15 tahun masih berada diatas 90 persen. Meskipun APS kelompok usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun mengalami tren positif, hal sebaliknya justru terjadi pada pencapaian APS kelompok usia 16-18 tahun yang masih di bawah 65 persen. Tingginya APS kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan jenjang SD dan SMP yang menjadi

tanggung jawa pemerintah Kabupaten Bogor telah banyak diakses oleh penduduk usia sekolah. Angka APS kelompok usia 16-18 tahun yang masih dibawah 65 persen perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat karena kelompok usia tersebut merupakan usia sekolah pada jenjang SMA yang pengelolaannya telah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. APS adalah perbandingan antara jumlah kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai yang dinyatakan dalam persentase (Gambar 2).



Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bogor

Sumber: Dis. Dik Kab. Bogor (2021)

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun, RLS Kabupaten Bogor telah meningkat signifikan sebesar 0,54 poin menjadi 8,29 di tahun 2019.

Ini berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP. Meskipun telah terjadi peningkatan namun capaian RLS Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2019 masih belum menunjukkan ketuntasan wajib belajar 9 tahun atau tamat pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Capaian RLS tahun 2019 menempatkan Kabupaten Bogor berada di peringkat ke 13 dibawah RLS Provinsi Jawa Barat sebesar 8,37 tahun. Bila diamati mendalam pada 40 kecamatan, Pencapaian RLS tertinggi berada di Kecamatan Cibinong sebesar 9,10 tahun. Hal ini tidak mengherankan karena Kecamatan Cibinong merupakan ibukota Kabupaten Bogor

yang memiliki sarana dan prasarana bidang pendidikan memadai. Selain itu, RLS Kecamatan Cibinong menjadi satu-satunya kecamatan yang berhasil menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. Sementara itu, pencapaian RLS terendah berada di Kecamatan Sukajaya sebesar 6,54 tahun yang artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di daerah tersebut hanya menamatkan pendidikan formal sampai dengan sekolah dasar atau sederajat saja. Terdapat 27 kecamatan yang memiliki RLS diatas RLS Kabupaten Bogor dan 13 Kecamatan memiliki RLS dibawahnya. Ayuningtyas (2021) dalam penelitiannya menyatakan untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan membangun sekolah baru yang mudah dijangkau serta penyediaan sarana transportasi yang mudah, murah, dan layak bagi anak sekolah.

**Tabel 2.** RLS Kecamatan tahun 2019

Kecamatan	RLS (tahun)
Cibinong	9,1
Kemang	8,6
Gunung Sindur, Citeureup, Bojong Gede, Gunung Putri	8,5
Ciomas, Dramaga, Cigombong	8,4
Babakan Madang, Cileungsi, Sukaraja	8,3
Parung, Ciampea	8,2
Ciawi, Tmanasari, Parung Panjang	8,1
Cisarua, Tanjungsari, Ciseeng, Cariu, Megamendung	8,0
Pamijahan, Tenjo, Caringin, Tenjolya, Cibungbulang	7,9
Rancabungur, Rumpin, Leuwisadeng	7,7
Cijeruk, Klapanunggal	7,6
Nanggung, Jonggol, Leuwiliang	7,5
Jasinga	7,3
Cigudeg, Tahurhalang	7,1
Sukamakmur	6,9
Sukajaya	6,5

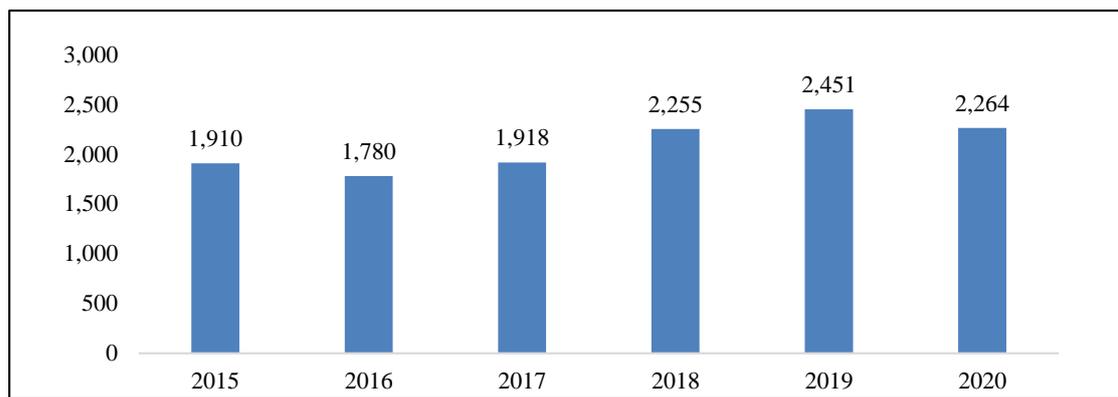
**Sumber:** Bappedalitbang Kab. Bogor, 2021

Indikator selanjutnya yang menjelaskan kondisi pendidikan di Kabupaten Bogor adalah rasio murid guru (RMG). Rasio Murid per Guru adalah perbandingan antara jumlah murid dan jumlah guru pada tingkat pendidikan tertentu. Semakin tinggi rasio murid per guru memiliki arti bahwa semakin banyak murid yang mendapatkan pelayanan dari seorang guru sehingga akan berdampak terhadap rendahnya kualitas pengawasan dan pengajaran. Pada 2019, RMG SD, SMP, dan SMA masing-masing mencapai 27, 35, 27. Capaian ini masih berada di atas kondisi ideal rasio murid guru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 17 yang menetapkan rasio efektif murid per guru sebagai berikut: RMG untuk SD adalah 20, RMG untuk SMP adalah 20, dan RMG untuk SMA adalah 20.

Sarana dan prasarana pendidikan sangat mempengaruhi kualitas pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor. Sebagai daerah dengan wilayah luas dan jumlah penduduk nomor satu terpadat se-Indonesia, pemerataan dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal paling mutlak. Kajian (Mizan dkk., 2018) menunjukkan peningkatan jumlah bangunan sekolah akan meningkatkan indeks pendidikan. Rahmatin et al. (2017) menyatakan jumlah sekolah berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah.

Ayuningtyas (2020) dalam penelitiannya juga menyatakan untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan membangun sekolah baru yang mudah dijangkau serta penyediaan sarana transportasi yang mudah, murah, dan layak bagi anak sekolah. Kabupaten Bogor tercatat memiliki ruang kelas paling banyak se-Jawa Barat dengan berbagai kondisi di semua jenjang pendidikan di tahun 2019. Pada tingkat sekolah dasar terdapat 26 persen ruang kelas dalam keadaan baik, 63 persen ruang kelas rusak ringan, 7 persen ruang kelas rusak sedang, dan sebanyak 4 persen ruang kelas rusak berat. Pada jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 39 persen ruang kelas dalam keadaan baik, 53 persen rusak ringan, 5 persen rusak sedang, dan 3 persen rusak berat. Sementara untuk jenjang sekolah menengah atas, ruang kelas dalam keadaan baik berjumlah 56 persen, rusak ringan 38 persen, rusak sedang 4 persen, dan rusak berat sebanyak 2 persen.

Secara umum proporsi anggaran bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015 sampai 2020 masih berada di atas 20 persen dari APBD sesuai dengan kebijakan *mandatory spending* yang diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).



**Gambar 3.** Alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2015-2020 (miliar rupiah)

**Sumber:** Dis. Dik Kab. Bogor (2021)

### Perumusan Strategi Dalam Peningkatan RLS di Kabupaten Bogor

Perumusan strategi disusun berdasarkan identifikasi faktor kunci pada lingkungan internal dan eksternal yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan responden ahli di bidang pendidikan Kabupaten Bogor. Tabel 3 menyajikan hasil analisis *Internal Factor Analysis* (IFAS) dan *External Factor Analysis* (EFAS).

**Tabel 3.** Matrik IFAS dan EFAS

Faktor Internal				
	Kekuatan (S)	Bobot	Rating	Skor
1	Komitmen Kepala Daerah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat	0,1218	3,80	0,46
2	Komitmen dan political will DPRD dalam meningkatkan pendidikan masyarakat	0,1168	3,80	0,44
3	Peran aktif pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan	0,1066	4,00	0,43
4	Kesesuaian alokasi anggaran bidang pendidikan dengan peraturan perundang undangan	0,1117	3,80	0,42
5	Kesesuaian RPJMN. RPJMD. RKP dan RKPD bidang pendidikan	0,1168	3,60	0,42
6	Koordinasi antar unit kerja dalam pemerintah daerah pada upaya mendukung pembangunan bidang pendidikan	0,0914	3,60	0,33
<b>Total (S)</b>		<b>0,6650</b>		<b>2,51</b>
Kelemahan (W)				
1	Validitas data pendidikan Kabupaten Bogor	0,0914	3,80	0,35
2	Pemerataan aksesibilitas hasil pembangunan bidang pendidikan	0,0863	3,60	0,31
3	Kuantitas dan kualitas sarana pendidikan	0,0863	3,60	0,31
4	Kuantitas, kualitas, dan distribusi sumber daya manusia bidang pendidikan	0,0711	3,80	0,27
<b>Total (W)</b>		<b>0,3350</b>		<b>1,24</b>
<b>Total (S+W)</b>		<b>1,0000</b>		<b>3,75</b>
Faktor Eksternal				
	Peluang (O)	Bobot	Rating	Skor
1	Dukungan pemerintah provinsi dan pusat pada bidang pendidikan	0,1183	4,00	0,47
2	Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	0,1183	4,00	0,47
3	Dukungan stakeholder (swasta) dalam pembangunan bidang pendidikan	0,1022	3,80	0,39
4	Partisipasi masyarakat pada perencanaan bidang pendidikan melalui musrembang	0,0860	3,80	0,33
5	Peran kelembagaan masyarakat di bidang pendidikan	0,0860	3,80	0,33
<b>Total (O)</b>		<b>0,5108</b>		<b>1,99</b>

Ancaman (T)				
1	Pengaruh jumlah penduduk terhadap pembangunan bidang pendidikan	0,1022	3,80	0,39
2	Pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan	0,0914	4,00	0,37
3	Pengaruh kondisi geografis terhadap pembangunan bidang pendidikan	0,1129	3,20	0,36
4	Kemampuan masyarakat untuk melanjutkan sekolah anak-anaknya	0,0968	3,60	0,35
5	Pengaruh kemiskinan terhadap pencapaian pendidikan di masyarakat	0,0860	3,60	0,31
<b>Total (T)</b>		<b>0,4892</b>		<b>1,77</b>
<b>Total (O+T)</b>		<b>1,0000</b>		<b>3,76</b>

Sumber: Diolah (2022)

Berdasarkan matrik IFAS dan EFAS, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kemampuan yang baik dalam merespon isu pada faktor lingkungan internal dan eksternal sehingga perumusan strategi yang layak diaplikasikan berada pada kuadran I yakni

strategi tumbuh dan membangun. Selanjutnya hasil analisis terhadap faktor strategis pada faktor lingkungan internal dan eksternal digunakan untuk merumuskan beberapa alternatif strategi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.** Matrik SWOT dan alternatif strategi

Strategi Strength-Opportunity (S-O)	Strategi Weakness-Opportunity (W-O)
1. Meningkatkan peran aktif stakeholders pada pembangunan bidang pendidikan (S1, S2, S5, O1, O2, O4, O5)	1. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia bidang pendidikan (W1, W2, W3, O1, O2, O3, O4, O5)
2. Peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran yang produktif (S1, S2, S3, S4, O2, O3)	2. Meningkatkan ketersediaan data pendidikan yang akurat dan berkualitas (W4, O2, O4, O5)
Strategi Strength-Threat (S-T)	Strategi Weakness-Threat (W-T)
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata (S1, S2, S3, S4, S5, S6, T1, T5)	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dan menengah melalui sosialisasi yang berkelanjutan (W1, W2, W3, T2, T4, T5)
2. Meningkatkan program pemberdayaan di bidang ekonomi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat (S1, S2, S5, T2, T3, T4)	

Sumber: Diolah (2022)

Setelah merumuskan tujuh alternatif strategi berdasarkan analisis SWOT maka perlu dilakukan penentuan strategi prioritas menggunakan metode QSPM karena tidak semua alternatif strategi dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah

karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hasil analisis QSPM berdasarkan tingkat ketertarikan relatif/*relative attractiveness* menunjukkan peringkat prioritas dari tujuh alternatif strategi yang disajikan pada tabel 5.

**Tabel 5.** Hasil *Qualitative Strategic Planning Matrix* (QSPM)

Strategi	TAS	Prioritas
1. Peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran yang produktif	8,23	1
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata	7,82	2

3.	Meningkatkan ketersediaan data pendidikan yang akurat dan berkualitas	7,78	3
4.	Meningkatkan peran aktif stakeholders pada pembangunan bidang pendidikan	7,77	4
5.	Meningkatkan program pemberdayaan di bidang ekonomi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat	7,74	5
6.	Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dan menengah melalui sosialisasi yang berkelanjutan	7,50	6
7.	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia bidang pendidikan	6,99	7

Sumber: Diolah (2022)

Hasil QSPM menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran yang produktif menjadi strategi prioritas pertama dalam upaya meningkatkan capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten

Bogor. Pada tabel berikut disajikan rancangan pelaksanaan teknis dari strategi prioritas pertama sampai dengan ketiga yang mencakup program serta kegiatan pada masing-masing strategi dalam upaya meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bogor.

**Tabel 6.** Perancangan strategi, program, dan kegiatan

Strategi	Program	Tahun ke-	Kegiatan	Penanggung Jawab
1. Peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang produktif	Perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran pendidikan		1. Optimalisasi perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) yang fokus kepada kebutuhan masyarakat 2. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang berhubungan langsung dengan program peningkatan pendidikan 3. Peningkatan bantuan operasional pendidikan kepada siswa tidak mampu 4. Optimalisasi kegiatan kejar paket A, B, dan C dengan melibatkan peran stakeholder	Bappedalitbang, Dinas, Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata	Peningkatan sarana dan prasarana bidang pendidikan		1. Pembangunan sekolah baru dan renovasi sekolah yang rusak pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) 2. Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan untuk mempermudah memperoleh pelayanan pendidikan 3. Penyediaan sarana transportasi gratis bagi siswa	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan

Strategi	Program	Tahun ke-	Kegiatan	Penanggung Jawab
3. Meningkatkan ketersediaan data pendidikan yang akurat dan berkualitas	Pembangunan data base pendidikan		1. Pelatihan penyusunan data bidang pendidikan 2. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Diolah (2022)

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Meskipun alokasi anggaran bidang pendidikan di Kabupaten Bogor telah mencapai lebih dari 20 persen dari APBD, RLS Kabupaten Bogor masih berada di bawah RLS Provinsi Jawa Barat dan nasional Terdapat 12 kecamatan dengan pencapaian RLS di atas RLS Kabupaten Bogor dan 28 Kecamatan dengan RLS di bawahnya. Hasil analisis SWOT dan QSPM terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal menunjukkan bahwa strategi prioritas dalam meningkatkan RLS bahwa Peningkatan kualitas pembangunan bidang pendidikan melalui kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang produktif dan Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata menjadi strategi prioritas dalam meningkatkan capaian RLS Kabupaten Bogor.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan.

### Saran

1. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal berupa program kejar paket A,

B, dan C sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan.

2. Proporsi alokasi belanja yang memberikan manfaat langsung terhadap pelayanan pendidikan perlu selalu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan bidang pendidikan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggorowati, E. L., Shinta, A. A. M., Nafi'ah, E. R., & Lathif, S. (2019). Peran Pendidikan Karakter Sebagai Wujud Pendidikan Berkualitas Sesuai Tujuan Sdgs. *Prosiding Seminar Nasional V Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2). <https://doi.org/10.24832/Jpnk.V6i2.2128>
- Basri Bado, & Sitti Hasbiah. (2017). Analisis Pertumbuhan Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Selatan. *Journal Economics*, 5(2017), 238–249.
- Fahmi, A. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan Dan Kesehatan, Dan Pdrb Perkapita Terhadap Ipm. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/Jmnp.V2i1.285>
- Hadinata, E., Valeriani, D., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Sorot*,

- 15(1).  
<https://doi.org/10.31258/Sorot.15.1.43-53>
- Harjunadhi, J. T., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Dan Ump Terhadap Ipm Di Indonesia Tahun 2014–2018 . *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 16(2), 241–249.
- Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan Sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1).  
<https://doi.org/10.34010/Agregasi.V8i1.2765>
- Indeks Pembangunan Manusia 2019*. (2019).
- Iskandar, A. (2021). Desentralisasi Dan Efisiensi Belanja Fungsi Pendidikan Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Propinsi Sulawesi Selatan. *Info Artha*, 5(1).  
<https://doi.org/10.31092/Jia.V5i2.1139>
- Margaretha, E., & Simanjuntak, R. A. (2020). Dampak Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Info Artha*, 4(2).  
<https://doi.org/10.31092/Jia.V4i2.816>
- Mizan, A. Al, Falatehan, A. F., & Wahyuni, E. S. (2018). Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Indeks Pendidikan Di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10. [https://doi.org/10.29244/Jurnal\\_Mpd.V10i-.22711](https://doi.org/10.29244/Jurnal_Mpd.V10i-.22711)
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2).  
<https://doi.org/10.33105/Itrev.V4i2.122>
- Munir, Ikhsan. (2016). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. *Garuda.Ristekbrin.Go.Id*, 4. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/630075>
- Siregar, R., Fadillah, H., & Fatimah, S. (2018). *Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan*. 6, 82–105.
- Soempena, G. (2021). *Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Faktor Lainnya Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat*.
- Suratini. (2017). Future Jurnal Manajemen Dan Akuntansi. Dalam *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* (Vol. 5, Issue 1). [www.jurnal.uniyap.ac.id/index.php/future](http://www.jurnal.uniyap.ac.id/index.php/future)
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2, 91–102.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9 Ed.). Erlangga.
- Yanti, N., Nurtati, N., & Misharni, M. (2020). Investasi Modal Manusia Bidang Pendidikan: Dampak Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, 6(1).  
<https://doi.org/10.35906/Jep01.V6i1.504>
- Zulfa Rahmatin, U., & Ady Soejoto, P. (2017). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Di Kota Surabaya. Dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi* (Vol. 01, Issue 2).